

**FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOOORDINATOR PEMBANGUNAN DI  
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR  
SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar  
Tersebut di Bawah ini :

Judul Penelitian : **Fungsi Camat Sebagai Koordinator Pembangunan Di  
Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur**

Nama : Janusri Nastha

No Stambuk : 45 08 021 023

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah di periksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
ilmu sosial (S.Sos) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Makassar, 2016

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Juharni, M.Si

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

Mengetahui :

Dekan Fisipol

Ketua Jurusan

Arief Wicaksono, S.Ip.,M.A

Drs. Natsir Tompo, M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini selasa, tanggal tiga puluh, bulan agustus tahun dua ribu enam belas Skripsi dengan Judul “**FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PEMBANGUNAN KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**”

Nama : Janusri Nastha  
Nomor Stambuk : 45 08 021 023  
Jurusan : Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

### PANITIA UJIAN :

Ketua

Sekretaris

**Arief Wicaksono, S.ip.,M.A**

Dekan FISIPOL  
Universitas Bosowa Makassar

**Drs. Natsir Tompo,M.si**

Ketua Jurusan Administrasi Negara  
Universitas Bosowa Makassar

### TIM PENGUJI :

1. Arief Wicaksono, S.ip.,M.A (.....)
2. Dr. Nurkaidah,MM (.....)
3. Nining Haslinda S.Sos. M.si (.....)
4. Dr.Syamsul Bahri,S.Sos.M,si (.....)

## **FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PEMBANGUNAN DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**1. Dra. Hj. Juharni, M.Si. 2. Arief wicaksono. S.Ip, MA. 3. Janusri Nastha**

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Bosowa Makassar

Abstrak

**Janusri Nastha, 4508021023. "Fungsi Camat sebagai Pembangunan Koordinator Di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Angkona"** di bawah bimbingan **Dra. Hj. Juharni, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Arief wicaksono. S.Ip, MA** sebagai Pembimbing II, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar.

Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraihinya. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional yang sementara ini dilaksanakan, diperlukan suatu dorongan dan motivasi secara langsung dilakukan oleh Pemerintah sebagai subyek. Sehingga mampu menumbuhkan semangat serta gairah rakyat untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan nasional tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pembangunan pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Hal yang menjadi fokus pengamatan penulis adalah perbandingan antara sarana gedung sekolah sebagai sarana pendukung utama bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara serta dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) Pelaksanaan koordinasi oleh Camat Angkona terhadap kegiatan Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan adalah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berada di Wilayah Kecamatan Angkona. (2) Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat Angkona terhadap dinas-dinas otonom utamanya dalam kegiatan pembangunan pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona adalah cukup baik. (3) Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yaitu: Kesadaran para kepala dinas-dinas otonom untuk mematuhi koordinator, Kesadaran para kepala Instansi Vertikal untuk mematuhi koordinator, Kesadaran daerah binaan (Desa/LKMD) untuk mematuhi koordinator.

Kata kunci : Fungsi Camat, Pembangunan Pendidikan, Pembangunan Koordinator, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Angkona.

## ABSTRACT

**Janusri Nastha, 4508021023, "Function of The Head District as Development Coordinator in District Angkona, East LuwuRegency"** under the guidance of **Dra. Hj. Juharni, M.Sias** a mentor I and **Arief wicaksono. S.Ip, MA** as supervisor II, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bosowa, Makassar.

Development is currently being implemented is one of the real efforts made by Indonesia in the independence that has been achieved. In order to succeed the interim national development is implemented, required an impulse and motivation are directly carried out by the Government as the subject. So as to cultivate the spirit and passion of the people to participate in the success of national development.

This study aims to determine the barriers to the development of education that should receive serious attention from the government, District Angkona, LuwuTimur. The focus of the author's observation is a comparison between the means of the school building as a primary means of support for the successful implementation of the development. The method used is descriptive analytical. Techniques of collecting data obtained through observation techniques, questionnaires and interviews, and documentaries.

These results indicate that, (1) The coordination by the Head Angkona the activities of District Level vertical institutions are actively involved in the implementation of educational development located in the County District of Angkona. (2) The coordination conducted Angkona Head of the main autonomous agencies in development activities in the District Area Angkona education is quite good. (3) There are three main factors that affect the coordination of development activities are: Awareness of the heads of departments autonomous to comply with the coordinator, awareness of the heads of vertical institutions to comply with the coordinator, Awareness target areas (rural/LKMD) to comply with the coordinator.

**Keywords:** Head District's Function, Education Development, Development Coordinator, Luwu Timur, District Angkona

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada segenap hambahnya, khususnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PEMBANGUNAN DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR”** Ini dapat di selesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana. Demikian pula, penulis mengucapkan selamat dan salam atas junjungan nabi akhir zaman penyempurna ajaran untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun material. Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud sebagai mana yang diharapkan akibat wawasan dan cakrawala berpikir masih dangkal, namun berkat bantuan dan pertolongan **Ibu Dra. Hj. Juharni, M.Si** sebagai pembimbing 1 dan **Bapak Arif Wicaksono, S.Ip, MA** sebagai pembimbing 11, yang telah membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat diwujudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi sarjana Administrasi Universitas “45” Makassar.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari kekurangan yang terdapat didalamnya sehingga dengan demikian sangat diharapkan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya sebagai penyempurnaan penulisan ini nantinya.

Sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban dan senantiasa memanjatkan doa, hingga

penulis dapat menggapai cita-citanya.

Ucapan terima kasih yang sama penulis tujukan kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Juharni, M.Si sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar.
2. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta seluruh staf Administrasi FISIPOL Universitas “45” Makassar.
3. Pemerintah wilayah Kecamatan Angkona dan seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Insya Allah atas segala bantuan, dorongan, kerjasama dan pengorbanan yang telah diberikan semua pihak, akan diberikan imbalan setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, ..... 2016

**JANUSRI NASTHA**

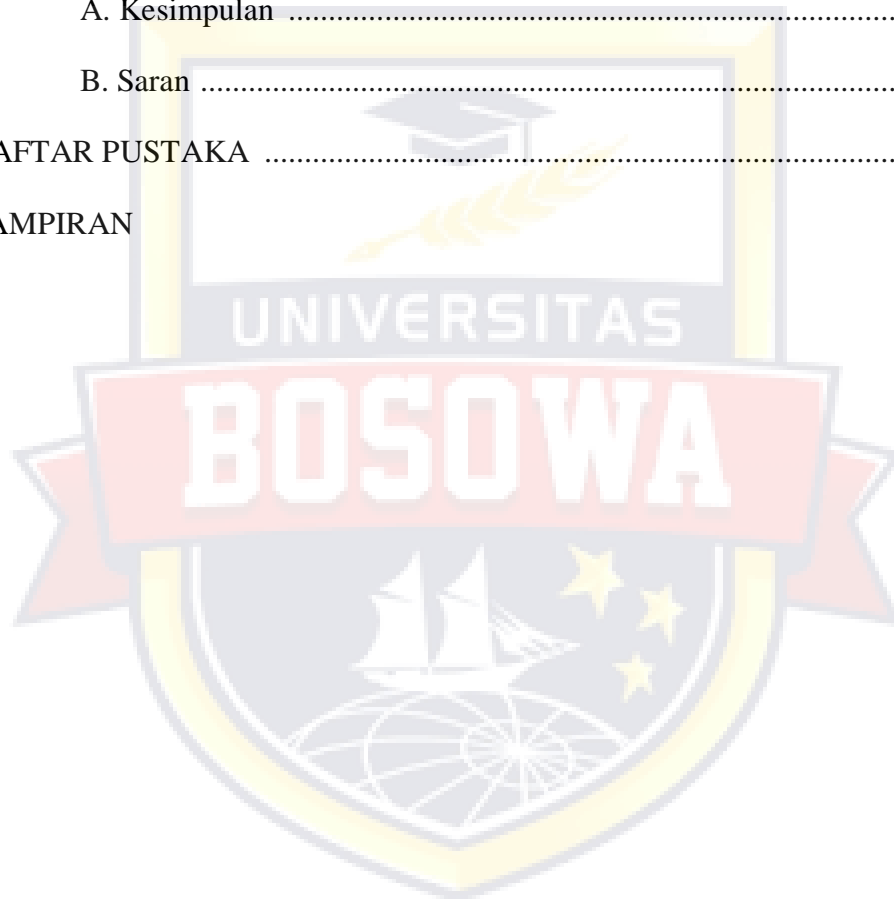
## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II : LANDASAN TEORI .....	7
A. Pengertian Koordinasi .....	7
B. Fungsi, Jenis dan Peranan Koordinasi .....	10
C. Metode Koordinasi .....	17
D. Camat Sebagai Kepala wilayah kecamatan .....	21
E. Pengertian Pembangunan .....	23
F. Pengertian Pembangunan Pendidikan .....	25
G. Kerangka Konseptual .....	26



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....	29
A. Tipe Dan Dasar Penelitian .....	29
1. Tipe Penelitian .....	29
2. Dasar Penelitian .....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
C. Populasi Dan Sampel .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	31
E. Analisis Data .....	32
F. Teknik Analisis Data Yang Di Gunakan .....	32
BAB IV : DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Deskripsi Data .....	33
1. Selayang Pandang Kecamatan Angkona.....	33
2. Keadaan Penduduk.....	34
3. Pendidikan .....	37
4. Agama .....	38
5. Struktur Organisasi .....	39
6. Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan Angkona .....	43
B. Pembahasan .....	46
1. Koordinasi Antara Camat Dengan Instansi Vertikal/Otonom Pada Sektor Pembangunan Pendidikan .....	46
2. Bentuk Koordinasi Antara Camat Dengan Pemerintah Desa Pada Sektor Pembangunan .....	54
3. Perencanaan Pembangunan Pendidikan Di Desa/Kelurahan Se- Kecamatan Angkona .....	55

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	
Se- Kecamatan Angkona .....	59
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan	
Koordinasi .....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Luas Setiap Desa di Wilayah Angkona .....	35
2. Jumlah Penduduk Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan Angkona .....	36
3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Angkona .....	37
4. Mata Pencaharian Penduduk di Wilayah Kecamatan Angkona .....	38
5. Tingkat Pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona .....	39
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Angkona .....	40
7. Penilaian Responden Tentang Pelaksanaan Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Camat Angkona Terhadap Instansi Vertikal (Depdikbud)/Instansi lain .....	53
8. Penilaian Responden Tentang Kerja Sama Camat Angkona Dengan Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Daerah .....	54
9. Penilaian Responden Tentang Kerja Sama Camat Dengan Daerah Bawahan Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Desa .....	59
10. Penilaian Responden Tentang Koordinasi Dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kecamatan Angkona .....	63
11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Upaya Keterpaduan di Kecamatan Angkona Terhadap Kegiatan Pembangunan Pendidikan .....	64

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang sekarang ini sedang giat-giatnya dilaksanakan merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang diraihinya. Pembangunan nasional adalah satu langkah dan tindakan guna memperbaiki tatanan kehidupan nasional secara berkesinambungan dan dinamis. Bagi pemerintah dan rakyat Indonesia pembangunan yang sedang dan terus akan dilaksanakan ini. merupakan manifestasi dan cita-cita yang ingin diwujudkan, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata ditinjau dari segi material maupun spritual yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional yang sementara ini dilaksanakan, diperlukan suatu dorongan dan motivasi yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah sebagai subyek. Sehingga mampu menumbuhkan semangat serta gairah rakyat untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu partisipasi rakyat akan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Partisipasi rakyat yang dimaksudkan di atas adalah merupakan suatu kegiatan kerja sama yang dilakukan secara sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap bermanfaat dan merupakan sarana dalam meningkatkan produktifitas masyarakat itu sendiri, Oleh karena itu lembaga pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, dalam hal ini camat mempunyai wewenang dalam

menjalankan roda pemerintahan dan mengkoordinasikan dengan para aparat pemerintahan lainnya di tingkat kecamatan. Baik itu instansi vertikal maupun instansi otonom dalam merumuskan suatu perencanaan dan pola kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu camat sebagai koordinator pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya Camat Angkona mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal, instansi otonom dan masyarakat di tingkat kecamatan yang bersangkutan, sehingga dapat terwujud di dalam kerja pemerintahan yang stabil. Camat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala wilayah di tingkat atas sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri No 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kecamatan pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: "Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota." (1996 : 3).

Sehubungan dengan hal tersebut guna menjaga dan memelihara kelancaran jalannya pemerintahan yang baik serta meningkatnya pelaksanaan pembangunan khususnya pada tingkat kecamatan, maka haruslah tercipta suatu iklim kerja yang baik dan sesuai dengan program pemerintah yang telah ditetapkan. Selain itu pula diciptakan keintegrasian dan keselarasan kerja antara camat dengan organisasi lainnya serta masyarakat dalam wilayah kecamatan tersebut, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.48 tahun 1996 pasal 4 yaitu: Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Tugas pokok camat dalam pembangunan menurut Keputusan Menteri No. 158 tahun 2004 ini meliputi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban wilayah, ekonomi, sosial budaya, pembangunan masyarakat desa, keagrarian administrasi dan bidang khusus. Dilihat dari tugas-tugas pokok camat tersebut, maka tanggung jawab camat ini sangatlah luas dalam bidang pembangunan.

Pembangunan pada sektor pendidikan yang dikategorikan dalam tugas pokok camat. Untuk pembangunan di bidang sosial budaya, perlulah mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah kecamatan sebagai koordinator pembangunan, sebab pendidikan merupakan langkah awal dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Karena dalam kehidupan suatu bangsa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan peradaban suatu bangsa dan negara itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang sementara ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan usaha untuk mengsucceskan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan pendidikan nasional secara khusus, diperlukan suatu kerjasama antara masyarakat yang merupakan obyek pembangunan maupun pemerintah sebagai subyek pembangunan tersebut.

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh secara adil dan merata, di mana

salah satu faktor pendukung untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pemerataan pendidikan secara nasional, baik yang dimulai dari tingkat nasional (pusat) hingga ke tingkat Kecamatan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional ini maka peran serta keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat. Di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sistem pendidikan nasional. Untuk itu semua pihak utamanya pemerintah perlu berusaha menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan mendukung terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri, terutama dalam melakukan kerjasama serta koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, maka melihat kondisi yang ada di kecamatan Angkona berkaitan dengan upaya pemerintah kecamatan utamanya camat Angkona dalam melaksanakan pembangunan pendidikan terutama dalam melaksanakan program dan kebijaksanaan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena di daerah kecamatan Angkona masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang sering menghambat pembangunan pendidikan yang sangat penting untuk mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Hal lain yang menjadi pengamatan penulis adalah perbandingan antara sarana gedung sekolah sebagai sarana pendukung utama bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan pendidikan yang ada jumlahnya hanya mencapai jumlah 26 buah dengan jumlah anak yang berusia sekolah yang mencapai 3,415 jiwa, sehingga daya tampung dari gedung sekolah tersebut dianggap kurang memadai dan perlu diadakan penambahan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa koordinasi merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul "Fungsi Camat Sebagai Koordinator Pembangunan di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan masalah menyangkut pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kecamatan Angkona khususnya dan Kabupaten Luwu Timur umumnya. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah koordinasi yang dilakukan oleh Camat Angkona dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun otonom dalam melaksanakan pembangunan pada sektor pendidikan.
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara Camat Angkona dengan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi.

Untuk membatasi kajian masalah dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Sejauh mana koordinasi camat atau kecamatan terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui koordinasi antara Camat Angkona dengan instansi terkait (instansi vertikal dan otonom) dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan pendidikan, utamanya dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi Camat Angkona dalam melaksanakan pemerintahan dan untuk memahami cara-cara pemecahan yang dihadapi, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan tersebut.
2. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi pihak lain yang ingin meneliti secara mendalam yang ada kaitannya dengan penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Koordinasi**

Salah satu komponen organisasi yang paling penting adalah kondisi, karena hal ini menyangkut kesatuan tindakan dari pengaturan sumber daya dan semua yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efektif. Koordinasi adalah proses untuk mengintegrasikan peranan-peranan dalam tugas yang berbeda dalam satu unit kerja dalam melaksanakan kumpulan tugas secara bersama. Untuk lebih mengetahui koordinasi ini terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian koordinasi itu sendiri yang dikemukakan oleh Robert Livingstone (1991 : 128) bahwa koordinasi adalah :

"Koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisir kegiatan tunggal, tetapi untuk mengorganisasi macam-macam kegiatan dalam ketunggalan adalah merupakan pencapaian yang sukar, koordinasi membuat organisasi baik. Ini adalah satu sistem keseimbangan dan kontrol tantangan dan tanggapan yang ada diantaranya."

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa koordinasi adalah suatu hal yang harus ada bagi setiap organisasi baik organisasi perusahaan maupun organisasi pemerintah untuk mengatur hubungan kerja sama, sehingga dalam menyelenggarakan setiap kegiatan akan mempermudah terlaksananya kearah tujuan yang hendak dicapai. Sebaliknya, dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam organisasi tanpa disertai kondisi yang baik, maka akan mengalami hambatan. Jadi koordinasi dan kondisi menerapkan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena kedua hal tersebut merupakan potensi yang menentukan tercapainya tujuan atau sasaran yang

telah ditetapkan.

Demikian pula dengan pengertian koordinasi yang dikemukakan oleh A.E. Ben dalam buku Sutarto Dasar-Dasar Organisasi (1991 : 127) yang mengatakan sebagai berikut:

1. Suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan organisasi Dan administrasi.
2. Penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan Dalton E.MC. Farland dalam buku Sutarto Dasar-Dasar Organisasi (1991 : 127) memberikan pengertian koordinasi, yaitu:

"Koordinasi adalah proses di mana pimpinan mengembangkan pola yang terakhir dari usaha kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan ber-sama."

Berdasarkan pengertian koordinasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi berintikan kesatuan tindakan atau kesatuan usaha kelompok secara teratur dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi pada dasarnya ialah kerja sama yang dilakukan oleh dua instansi atau lebih yang harus dilaksanakan terus menerus secara seimbang dan selaras di antara instansi yang satu dengan instansi yang lain sehingga dapat berjalan secara integral dan sinkron.

Lebih lanjut Dr. Ateng Syarifuddin, S.H (1989 : 71) mengatakan :

"Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menselaraskan tiap langkah dalam organisasi agar tercapai jarak yang tepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan

sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.”

Berdasarkan dari uraian di atas mencerminkan bahwa koordinasi adalah penyelenggaraan pemerintahan, merupakan pengaturan yang aktif, bahwa pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah serta lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dalam kegiatan saling tindih dan dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Penyelenggaraan pemerintahan wilayah terhadap masalah koordinasi bukan hanya menyangkut kerja sama melainkan integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelenggaraan unsur-unsur jumlah dan penentu dan waktu kegiatan, di samping juga menyangkut penyesuaian perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur antara semua pejabat atau petugas yang bersangkutan, dengan memahami serta mengendalikan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu pengaturan pelaksanaannya.

Penjelasan diatas berkaitan dengan pendapat George R. Terry dalam buku Sutarto Dasar-Dasar Organisasi (1991 : 19) mengenai pengertian koordinasi yang mengatakan sebagai berikut:

"Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk

menciptakan kesempatan kuantitas, waktu, dan pengerahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan."

Kemudian diperjelas lagi oleh pendapat Herbart G. Hicks dalam buku Sutarto Dasar-Dasar Organisasi (1991 : 29) yang mengatakan bahwa:

"prinsip koordinasi mengungkapkan bahwa pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan sumber disinkronkan, diseimbangkan, diberikan pengarahan."

Jadi, koordinasi itu bukan saja kerja sama dan kesatuan tindakan akan tetapi juga sinkronisasi, integrasi penentuan waktu kegiatan dan pengarahan yang menghasilkan penyelarasan, kesemuanya itu adalah obyek yang ikut serta didalam memberikan andil untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Koordinasi sebagai azas utama yang meliputi semua kegiatan aktivitas dalam organisasi yang menunjukkan bahwa adanya hubungan-hubungan wewenang dan tanggung jawab yang terjadi di dalam setiap usaha bersama dimana terdapatnya hubungan antar atasan dengan bawahan itu sendiri yang harus selalu diintegrasikan hingga terwujud suatu koordinasi yang benar dan didasarkan pada persamaan kepentingan yang ril yaitu ril dalam arti yang objektif dan ril dalam arti kesadaran para anggota organisasi.

## **B. Fungsi, Jenis Dan Peranan Koordinasi**

### **1. Fungsi Koordinasi**

Sebagaimana dikemukakan pada halaman terdahulu mengenai beberapa pengertian koordinasi, maka ada baiknya jika sejenak diketengahkan fungsi koordinasi dengan mengutip beberapa pendapat dari sarjana-sarjana guna

dijadikan dasar dalam pembahasan lebih lanjut.

Menurut Soewarno Hadayaningrat, fungsi koordinasi adalah:

- a. Koordinasi adalah suatu fungsi manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan, pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan.
- b. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat menjamin dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan (frection) yang timbul antara semua komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama diantara komponen-komponen tersebut.
- c. Koordinasi adalah merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan dan satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.
- d. Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, ditentukan oleh kualitas usaha-usaha organisasi yang dijalankan.
- e. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja yang diperlukan organisasi
- f. Perubahan organisasi berarti penambahan beban kerja atau fungsi-

fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Pertumbuhan ini sekaligus membawa akibat pula penambahan jabatan dan pejabat (orang-orang) yang perlu dikoordinasikan.

- g. Timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diperhatikan oleh organisasi dengan harapan para spesialis memainkan peranan yang tak lepas kaitannya dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih luas.

Dengan melihat berbagai fungsi koordinasi di atas jelaslah bahwa koordinasi pada hakekatnya merupakan prinsip organisasi yang mencakup segalanya dan memuat didalamnya wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mencapai suatu sasaran yang tepat, dengan cara keseluruhan diantara bagian-bagian dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Apabila dalam suatu organisasi kurang dilaksanakan organisasi akan terlihat adanya gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Petugas-petugas dan satuan-satuan organisasi bertengkar menuntut suatu bidang kerja atau wewenang masing-masing menganggap termasuk dalam lingkungan tugasnya. Dalam hal ini seringkali terjadi kekembaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang memboroskan tenaga, waktu dan material;
- b. Petugas-petugas dan satuan-satuan organisasi saling melemparkan sesuatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa sesuatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Pengingkaran tanggung jawab biasanya mengakibatkan adanya kekosongan tindakan yang semestinya dijalankan ;

- c. pencapaian tujuan organisasi tidak berjalan secara lancar karena susunan organisasi terasa serta kacau, para petugas nampak serta ragu dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata serba salah, saling berbenturan atau bahkan hasil pekerjaan yang satu sering dihapuskan oleh pekerjaan yang lain tanpa disadari. (sutarto, 1991 : 130-131)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat memberikan gambaran terhadap berbagai kesulitan dan tidak terjadinya semangat tertib kerja, dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik dalam suatu organisasi sehingga bisa menimbulkan pemborosan dari segi waktu, tenaga dan materi. Oleh karena itu untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya, perlu adanya koordinasi yang dinamis secara terus menerus. Sehingga dapat mencerminkan kerja sama yang memungkinkan terjadinya keserasian dan keseimbangan, dimana tumpang tindih dan kelancaran dalam pekerjaan dapat dihindari.

## **2. Jenis Koordinasi**

Dann Sugandha, menjelaskan secara teoritis menyangkut beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurnya yaitu:

- a. Menurut lingkupnya terdapat:
  - 1) Koordinasi intern, yaitu koordinasi antara pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi;
  - 2) Koordinasi ekstern, yaitu koordinasi diantara pejabat dari berbagai



organisasi;

b. Menurut arahnya terdapat :

- 1) Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi dan antara pejabat dari organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat ;
- 2) Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang organisasi oleh organisasi induknya.
- 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hirarkinya;
- 4) Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang berdasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

### **3. Peranan Koordinasi**

Adapun peranan koordinasi yang dikemukakan oleh Dann Sugandha adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses administrasi termasuk dalam administrasi pemerintahan. Karena pemerintahan pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintahan yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan (sistem approach). Oleh karena itu, disamping peranannya

dalam administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintahan, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai suatu kesatuan aparatur pemerintahan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara aparat pemerintahan diharapkan secara keseluruhan yang berdaya guna dan berhasil guna.

- b. Dalam era pembangunan dewasa ini, koordinasi mempunyai arti yang lebih penting lagi, terutama diantara aparatur pemerintahan. Hasil ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan program yang demikian itu pada tingkat yang dominan ditentukan oleh kerja sama yang baik diantara instansi bersangkutan, dimana koordinasi memainkan peranan yang sangat penting.

Adapun pengertian tentang manfaat koordinasi dalam suatu organisasi menurut sutarto (1991 : 131) mengemukakan sebagai berikut :

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi ;
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling terpenting ;
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satuan organisasi atau antara pejabat ;

4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas ;
5. Dengan adanya koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu yang menunggu yang memakan waktu lama;
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap tugas oleh para pejabat ;
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pekerjaan terhadap tugas oleh aparat ;
8. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama diantara para pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama ;
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian kejatuhan sesama pejabat lainnya ;
10. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antara para pejabat ;
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah para pejabat ;
12. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat ;

13. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.

Dari beberapa manfaat koordinasi di atas, pada hakekatnya menggambarkan betapa pentingnya koordinasi dalam setiap hubungan kerja sama yang ada di antara berbagai bagian yang melaksanakan tugas-tugas secara keseluruhan dan merupakan unsur pengendalian dalam mencegah terjadinya kesimpangsiuran untuk melaksanakan tugas masing-masing diantara para pejabat yang ada dalam suatu organisasi yang sama.

### **C. Metode Koordinasi**

Perlu diketahui bahwa dalam suatu kegiatan ataupun program pemerintahan yang tidak kurang pentingnya harus diperhatikan adalah metode dan tehnik koordinasi, dimana menurut soewarno Handyaningrat (1982 : 27) menyatakan bahwa dalam melakukan koordinasi dapat dibagi atas :

- 1) Koordinasi melalui wewenang
- 2) Koordinasi melalui konsensus
- 3) Koordinasi melalui pedoman kerja
- 4) Koordinasi melalui suatu forum
- 5) Koordinasi melalui konferensi

#### **Ad. 1. Koordinasi melalui wewenang**

Penggunaan wewenang yaitu merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian itu mungkin benar apabila organisasi tersebut bersifat homogen namun karena organisasi pemerintahan bersifat heterogen maka usahakan

adanya integrasi dari seluruh jenis dan fungsi-fungsi yang ada karena setiap fungsi hanyalah merupakan sub-sistem dan seluruh sistem pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan.

Ad. 2. Koordinasi melalui konsensus, yang terdiri dari :

a. Konsensus melalui motivasi

Yaitu motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, seperti organisasi pemerintahan yang sangat kompleks dimana mempunyai jenis dan fungsi yang beraneka ragam, yang memuat kepentingan bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai solidaritas berdasarkan kesetiakawanan yang dapat dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi.

b. Konsensus melalui sistem timbal balik

Yaitu sistem timbal balik/saling membantu dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi, sehingga tercapai keseimbangan antara tuntutan organisasi (tercapainya koordinasi) dan tuntutan individual, baik yang bersifat non material maupun yang bersifat material. Dalam hal ini faktor nilai-nilai pengabdian dapat pula merupakan dasar utama melaksanakan usaha koordinasi.

c. Konsensus melalui ide

Yaitu bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

#### Ad. 3. Koordinasi melalui pedoman kerja

Setiap aktivitas kerja yang dilakukan oleh organisasi harus didasarkan pada landasan atau petunjuk yang telah disusun secara manual, agar dalam melaksanakan aktivitas terdapat kesatuan gerak dan kesatuan tindakan, dalam rangka melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai dapat diukur tingkat keberhasilannya.

#### Ad. 4. Koordinasi melalui forum

Koordinasi disini dilakukan dengan menggunakan suatu wadah tertentu untuk tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerja sama dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan bersama dalam melaksanakan tugas bersama.

#### Ad. 5. Koordinasi melalui konferensi

Yaitu koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan maupun pada tingkat pelaksana. Rapat-rapat/sidang-sidang pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam mengintegrasikan seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian akan tercegah persepsi yang terkotak-kotak, tindakan, sikap dan perilaku anggota organisasi yang pada tingkat kecamatan, maka kaitannya Camat yang harus memprakarsainya.

Disamping metode koordinasi yang ditemukan di atas, maka faktor komunikasi sangat perlu diperhatikan terutama dalam prioritas utama dalam suatu sektor atau antara sektor yang melibatkan berbagai instansi/lembaga. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah :

1. Perlunya kejelasan siapa atau instansi/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program, dimana sebaiknya wewenang tersebut diletakkan pada badan fungsional yang paling bertanggung jawab atas kegiatan/program tersebut.
2. Perlu program kerja yang jelas dan baik sehingga akan jelas tujuan dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing badan/lembaga yang saling terkait.
3. Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan itu dasar fungsionalisasi perlu dituangkan dalam rangka prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terkait dalam hubungannya dengan realisasi program tersebut.
4. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik dan harmonis, antara lain dalam bentuk suatu badan kerja sama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas. Namun perlu diingat agar hal ini tidak mengurangi tugas dan wewenang/tanggung jawab unit-unit organisasi yang telah ada secara fungsional.
5. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan dalam pelaksanaan pembiayaannya.

#### **D. Camat Sebagai Kepala Wilayah Kecamatan**

Membahas mengenai camat, maka kita akan tertuju pada suatu wilayah kabupaten/kotamadya Negara Republik Indonesia. Seperti pada penjelasan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 tentang pedoman dan tata kerja pemerintah kecamatan, dinyatakan bahwa kedudukan camat adalah :

1. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.
2. Camat di wilayah kotamadya administratif/kota administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Walikota.
3. Camat di wilayah pembantu Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pembantu Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, pengertian pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka pencapaian nasional, sedangkan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif saja. Dari pengertian tentang pemerintah yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah aparat, organ dan alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan negara atau masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.



Dengan demikian, maka pemerintah pada wilayah kecamatan yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh camat beserta pembantu-pembantunya dalam hal ini dapat dilihat pada keputusan Menteri Dalam Negeri No.158 Tahun 2004 pasal 4 yang berbunyi: “camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa camat adalah salah satu mata rantai dari jalur dekonsentrasi karena pada dasarnya melaksanakan urusan pemerintah pusat yang disebut urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, Wilayah kecamatan adalah wilayah administratif yang tidak berhak mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri.

Jadi camat (kepala wilayah kecamatan) hanya merupakan pemegang kekuasaan eksekutif saja dan bertanggung jawab kepada kepala wilayah tingkat atasnya.

Berkaitan dengan itu, Maka Boyo Suryaningrat (1983 : 13) mengatakan bahwa :

“Pemerintah wilayah kecamatan adalah camat beserta seperangkat pemerintah lainnya yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya kepala daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan umum, urusan rumah tangga daerah tingkat II dan urusan serta tantra.”

Dengan melihat pengertian pemerintah wilayah kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah wilayah kecamatan adalah pemerintah dalam arti sempit, karena dalam melaksanakan kegiatan pemerintah hanya dilaksanakan oleh eksekutif saja.

Oleh karena itu camat mempunyai fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah dan tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Camat adalah seorang eksekutif yang merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan harus membuat rencana sebelum ia bekerja di mana tercakup tujuan yang hendak dicapai. Camat harus mengadakan pembagian pekerjaan, mencari orang-orang yang tepat pada tempatnya untuk melaksanakan pekerjaan, mengadakan latihan pegawai dan mengadakan kontrol atas pelaksanaan kerja pegawai tersebut.

Camat sebagai administrator pembangunan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan semua instansi-instansi yang ada ditingkat kecamatan. Camat mempunyai kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

#### **E. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik, berdasarkan warna-warna yang telah ditentukan. Perubahan-perubahan yang telah direncanakan menurut pola yang rasional inilah yang seringkali disebut pembangunan. Dalam pembangunan dibutuhkan faktor-faktor penunjang yang meliputi potensi alam dan sumber daya manusia, dan yang lebih menentukan ialah pelaku pembangunan itu sendiri, sebab walaupun sumber daya manusia potensial tetapi tanpa pengolahan yang baik

maka pembangunan akan mengalami hambatan.

Menurut Willierd D. Spelding dalam bukunya “The Dinamic Of Planned Changer” yang dikutip oleh Bintaro Tjakroamidjojo (1975 : 59), mengatakan sebagai berikut :

“Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu yang dianggap lebih baik.”

Sejalan dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Sondang. B Siagian (1984 : 3-4), sebagai berikut :

“Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.”

Melihat batasan-batasan di atas, maka beberapa ciri khas pembangunan yang penting digaris bawahi, yaitu :

1. Pembangunan itu adalah suatu proses perubahan yang kontinyu atau dengan istilah lain melalui tahapan-tahapan.
2. Pencapaian tujuan pembangunan, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, maka kegiatan awal dimulai dengan pembangunan di bidang akademi tanpa meningkatkan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang lain.
3. Hal yang penting dalam rangka kegiatan pembangunan adalah partisipasi masyarakat.
4. Di samping itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kegiatan kemasyarakatan seperti gotong-royong, musyawarah/mufakat dan lain-lain sebagainya perlu untuk dilestarikan.

## **F. Pengertian Pembangunan Pendidikan**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukumnya, maka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan secara umum ini berdasarkan pada dasar-dasar Negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada struktur organisasi pendidikan yang disusun berdasarkan pola-pola demokrasi. Dimana kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan secara sentral, akan tetapi dibagi-bagi atau diserahkan daerah-daerah sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah.

Sebagai akibat dari penggunaan sistem pendidikan yang cenderung mengarah pada struktur campuran yaitu struktur sentralisasi dan struktur desentralisasi ini, maka pembangunan pada bidang pendidikan secara prinsipil masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, utamanya yang menyangkut pengambilan kebijaksanaan mengenai program pendidikan, penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan. Sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dan pemantau dari kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mempunyai wewenang yaitu: menyusun dan menentukan anggaran wilayah biaya, merencanakan pola pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan, pengangkatan/ penentuan pengajar (guru), penyediaan buku-buku pengajaran pemakaian serta pemeliharaan gedung sekolah.

Demikianlah secara garis besar seperti gambar tentang keadaan struktur organisasi pendidikan di negara kita. Agaknya bagi negara kita, lebih

sesuai untuk menggunakan sistem campuran dari kedua sistem sentralisasi dan desentralisasi asalkan dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi dan keseimbangan yang harmonis.

### **G. Kerangka Konseptual**

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses administrasi termasuk dalam administrasi pemerintahan, karena pemerintah pada hakekatnya merupakan organisasi yang sangat besar dan kompleks, di mana terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintahan yang harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat berdasarkan sistem pendekatan (approach sistem). Oleh karena itu, disamping peranannya dalam administrasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai suatu keseluruhan aparatur pemerintah itu sendiri. Dengan adanya koordinasi yang baik antara aparat pemerintah diharapkan akan tercermin pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalton E.M.C Farland (dalam Sutarto 1993:142) mendefinisikan koordinasi sebagai berikut: "Koordinasi adalah proses di mana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok di antara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama." Dalam pelaksanaan pembangunan, faktor koordinasi memegang peranan yang sangat penting, di mana dengan adanya koordinasi pelaksanaan tugas camat sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang mempunyai hubungan kerja dengan instansi vertikal maupun otonom dan terhadap bawahannya akan tercapai suatu kesatuan tindakan atau kesatuan usaha guna mencapai tujuan

pembangunan tersebut. Hal ini dapat pula dilihat dari pengertian koordinasi yang dikemukakan oleh George R. Terry (1991:19): "Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kesempatan kuantitas dan pengerahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang ditetapkan,,"

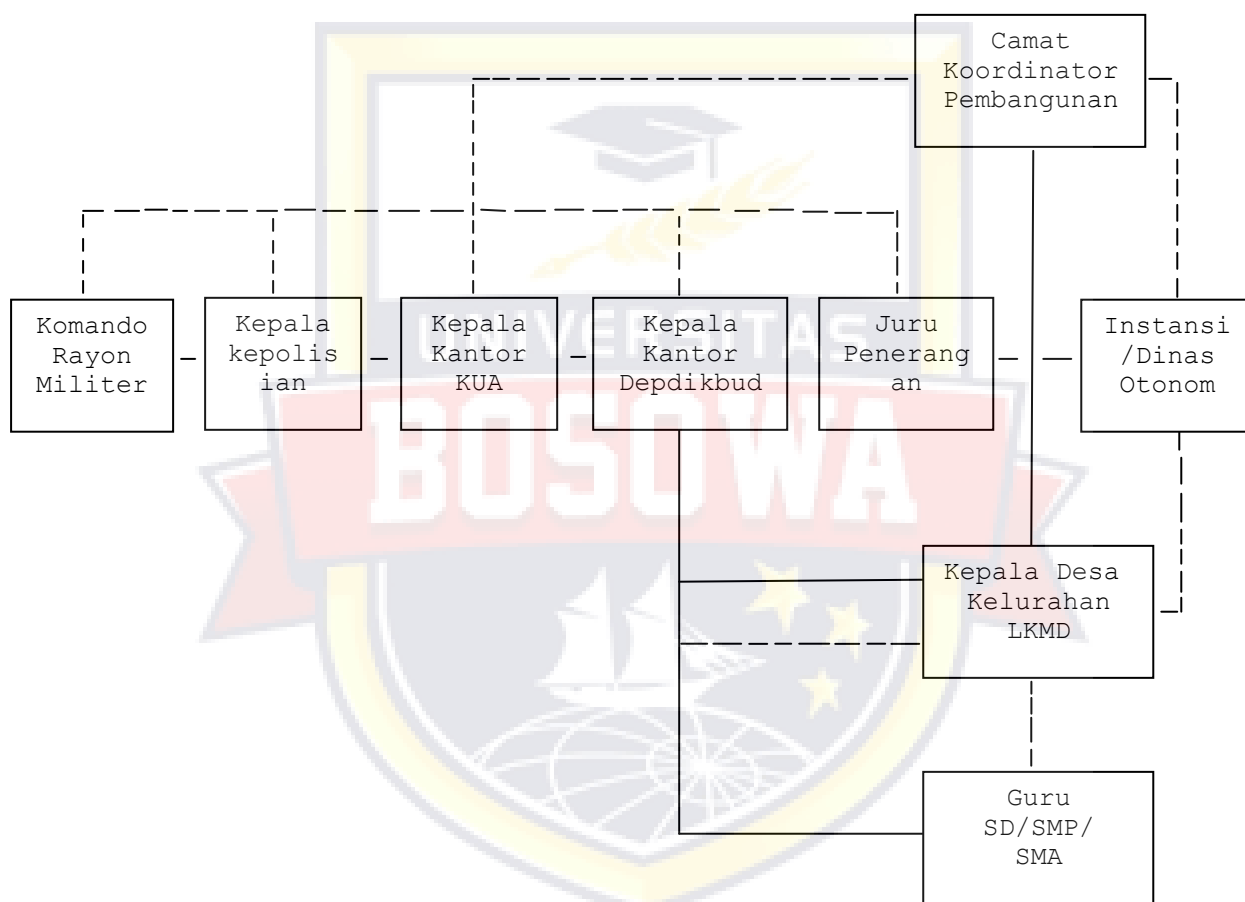
Tujuan bersama ini diharapkan dapat dicapai apabila antara semua anggota kelompok atau kelompok mempunyai dan menilai suatu kerjasama, kesatuan tindakan dan juga adanya sinkronisasi yang akan menyelaraskan dan menyatukan pandangan kelompok dan anggota kelompok tersebut, untuk mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu, di era pembangunan sekarang ini koordinasi mempunyai peranan dan arti sangat penting terutama di antara aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat yang mendasari/melandasi pada sektor-sektor pembangunan, yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang demikian itu pada tingkat yang dominan akan sangat ditentukan oleh adanya suatu kerja yang dibina secara baik dan harmonis antara instansi-instansi yang bersangkutan, di mana koordinasi akan memainkan suatu peranan yang sangat penting.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Skema : Koordinasi Antara Camat dengan Instansi Vertikal, Otonom, Daerah Bawahan serta Lembaga terkait lainnya

### Kerangka Konseptual



Keterangan :

———— = Garis Komando.

----- = Garis Koordinasi

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Tipe dan Dasar Penelitian**

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti.
2. Dasar penelitian ini adalah survei, yaitu hanya dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian Dilakukan Di Kantor Camat Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan 10 Oktober sampai dengan bulan 11 November Tahun 2011

### **C. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi pada hakekatnya jumlah keseluruhan unit yang terjadi atas objek/subyek yang merupakan sasaran penelitian, dalam hal ini adalah camat instansi vertikal, instansi otonom beserta jajarannya yang ada hubungan dengan koordinasi dalam pembangunan di bidang pendidikan pada wilayah Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur, di mana pada saat ini diadakan penelitian berjumlah 410 orang.



## 2. Sampel

Sehubungan dengan banyaknya instansi/pegawai yang akan menjadi sasaran penelitian pada lokasi penelitian, maka pengambilan sampelnya ditempuh suatu teknik purposive sampling yaitu dengan pengambilan sampel secara sengaja sebagian dari populasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dianggap representatif mewakili keseluruhan populasi.

Untuk lebih jelasnya yang dijadikan sampel atau responden dalam Penelitian ini sebagai acuan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut:

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Untuk tingkat kecamatan              |                |
| - Camat Angkona                         | 1 orang        |
| b. Untuk instansi tingkat kecamatan     |                |
| perincian sebagai berikut:              |                |
| - Para kepala instansi terkait          | 4 orang        |
| - Kepala/pegawai kantor Depdikbud       | 8 orang        |
| c. Daerah bawahan (Desa/Kelurahan/LKMD) | 11 orang       |
| d. Lembaga terkait lainnya:             |                |
| - Guru SD                               | 8 orang        |
| - Guru SMP                              | 5 orang        |
| - <u>Guru SMA</u>                       | <u>4 orang</u> |
| J u m l a h                             | 41 orang       |

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer.

### **a. Data Sekunder**

Dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep dan lain-lain. Unsur penelitian yang diperoleh melalui referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian.

### **b. Data primer**

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jalan observasi langsung ke lapangan.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1) Observasi (pengamatan)**

Observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian obyek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat. Adapun data yang diteliti adalah laporan-laporan kegiatan mengenai hasil pelaksanaan pendidikan di tingkat kecamatan.

### **2) Kuisisioner**

Daftar pertanyaan (kuisisioner) yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dan akurat dari

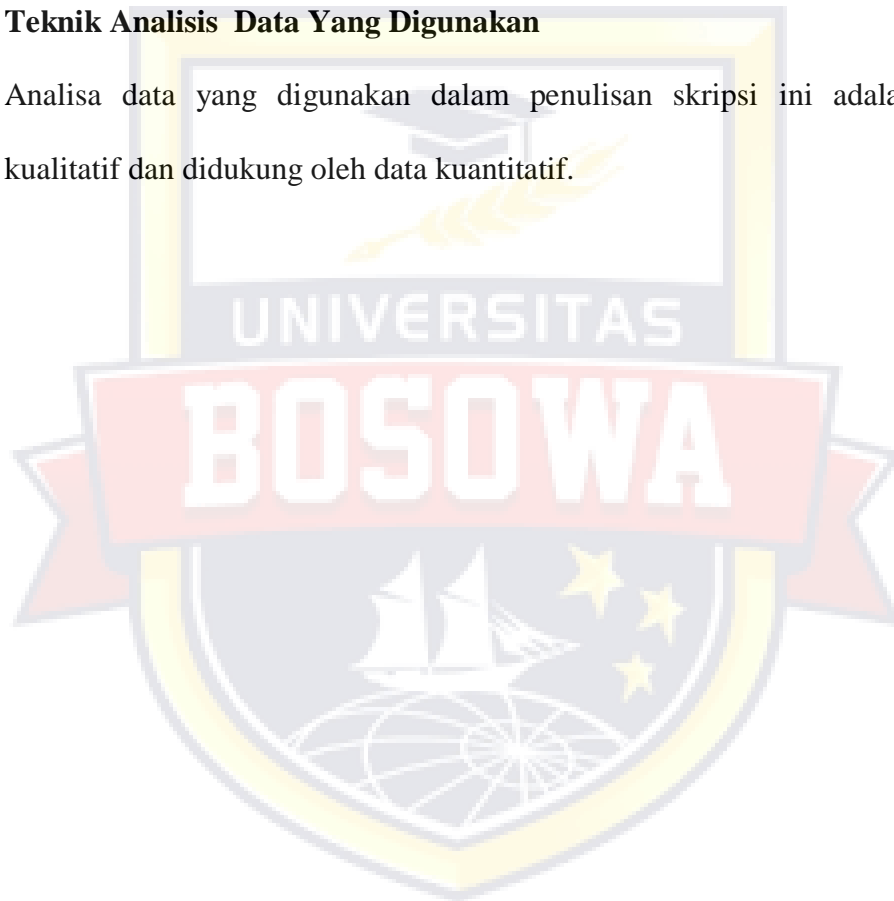
responden.

### **3) Wawancara (interview)**

Wawancara (interview) yaitu penulis secara langsung mengambil data/informasi kepada yang berwenang sebagai pelengkap data yang diperoleh dari kuesioner.

## **F. Teknik Analisis Data Yang Digunakan**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Singkat Selayang Pandang Kecamatan Angkona**

Seperti telah kita ketahui bahwa Daerah/wilayah mempunyai keadaan geografis yang berbeda-beda baik mengenai luas wilayahnya maupun letak serta batas-batasnya. Demikian pula dengan keadaan penduduk, pendidikan maupun agama yang dianut oleh penduduknya.

Kecamatan Angkona merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nuha
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malili dan Nuha
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana, Tomoni dan Wotu

Dengan batas-batas wilayah tersebut di atas maka luas wilayah Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur adalah 147,27 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa dengan perincian luas masing-masing dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Luas setiap Desa di Wilayah Kecamatan Angkona**

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Tawakua	32.24
2.	Tampinna	94.58
3.	Solo	10.72
4.	Taripa	23.02
5.	Mantadulu	23.32
6.	Balirejo	6
7.	Maliwowo	23
8.	Lamaeto	9.12
9.	Watangpanua	14
10.	Wanasari	10.75
Jumlah		

*Sumber data : papan potensi Kecamatan Angkona Tahun 2014*

Berdasarkan tabel di atas, ini menunjukkan bahwa Kecamatan Angkona terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa. Dari Keseluruhan Desa/Kelurahan yang disebutkan di atas maka Desa Tampina dan Desa Tawakua yang terluas dandesa terkecil adalah Desa Balirejo.

## **2. Keadaan Penduduk**

Kecamatan angkona dilihat dari keseluruhan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan salah satu wilayah yang cukup pada penduduknya serta cukup potensial untuk dikembangkan. Faktor penduduk yang cukup besar ini merupakan subyek dalam pembangunan baik secara langsung sehingga mempengaruhi cepat atau lambatnya laju perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan pembangunan yang dimaksudkan adalah perkembangan realisasi oleh wilayah kecamatan setempat.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur di tiap-tiap desa/kelurahan yang dapat diutarakan oleh penulis dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Setiap Desa Dalam Wilayah Kecamatan Angkona**

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Tawakua	1.500	1.405	2.905
2.	Tampinna	2.276	2.201	4.477
3.	Solo	994	929	1.923
4.	Taripa	1.499	1.440	2.939
5.	Mantadulu	1.127	1.087	2.214
6.	Balirejo	959	888	1.847
7.	Maliwowo	1.244	1.180	2.424
8.	Lamaeto	1.107	1.031	2.138
9.	Watangpanua	878	863	1.741
10.	Wanasari	670	646	1.316
Jumlah		12.254	11.670	23.924

*Sumber Data : Papan potensi Kecamatan Angkona Tahun 2014*

Berdasarkan tabel di atas, ini menunjukkan bahwa diantara Desa yang paling padat adalah Desa Tampinna sejumlah 4.477 jiwa dan Desa Wanasari yang masih kurang penduduknya yakni sejumlah 1.316 jiwa. Dengan melihat jumlah penduduknya tersebut secara keseluruhan sebanyak 23.924 jiwa yang terdiri dari pria sejumlah 12.254 jiwa dan wanita 11.670 jiwa.

Sehubungan dengan tabel tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Angkona penyebarannya yang belum merata. Hal ini disebabkan sebagian masyarakatnya selalu berpindah-pindah yang cenderung mengarah ke pusat kota, perpindahan dari desa ke desa dan ada pula yang merupakan pendatang hingga kemudian menjadi penduduk desa

tersebut. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Angkona, untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Angkona**

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4 Tahun	1.684
2.	5-9 Tahun	2.592
3.	10-14 Tahun	2.619
4.	15-19 Tahun	2.381
5.	20-24 Tahun	2.096
6.	25-59 Tahun	10.540
7.	60 Tahun ke atas	2.012
	Jumlah	23.924

*Sumber Dara : Papan Potensi Kecamatan Angkona Tahun 2014*

Apabila diperhatikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang terbanyak antara umur 25 - 59 tahun yaitu sejumlah 10.540 jiwa kemudian menyusul antara umur 10 - 14 tahun berjumlah 2.619 jiwa. Dan paling sedikit adalah yang berada pada umur 0 - 4 tahun yaitu berjumlah 1.684 jiwa.

Berikut ini dikategorikan mengenai mata pencaharian penduduk karena mata pencaharian merupakan hal yang mendasar dan mutlak untuk dinilai oleh penduduk dalam rangka menjamin kebutuhan serta kelangsungan hidup.

**Tabel 4**

**Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Angkona**

No.	Pekerjaan Pokok	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	4.759
2.	Nelayan	149
3.	Pedagang	17
4.	Pegawai	246
5.	Peternak	45
Jumlah		5.216

*Sumber Data : Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2014*

### 3. Pendidikan

Salah satu sektor paling utama adalah meningkatkan kualitas manusia adalah melalui sektor pendidikan. Pentingnya bidang pendidikan ini tidak hanya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan manusia guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapi tetapi juga warga masyarakat menjadi lebih kritis dalam melihat dan menanggapi suatu masalah selanjutnya direalisasikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa yang paling menonjol adalah mereka yang belum sekolah atau belum menamatkan pendidikannya pada tingkat SD yang berjumlah 10.277 jiwa, sedangkan untuk masyarakat yang melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD) berjumlah 7.332 jiwa. Tamatan SLTP sebanyak 3.032 jiwa. Tamatan SLTA sebanyak 2.720 jiwa, sedangkan mereka menamatkan pendidikannya pada Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 139 jiwa.



**Tabel 5**  
**Tingkat Pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum sekolah/tidak tamat SD	10.277
2.	Tamat SD/ sederajat	7.332
3.	Tamat SLTP/ sederajat	3.032
4.	Tamat SLTA/ sederajat	2.720
5.	Tamat Akademik/ sederajat	139
Jumlah		23.500

*Sumber data : Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2014.*

Dilihat dari tingkat pendidikan yang diuraikan di atas dengan status ekonomi yang berbeda-beda tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh baik berupa motivasi maupun keikutsertaan di bidang tugas pelayanan pemerintah wilayah kecamatan.

#### **4. Agama**

Mengenai penganut Agama di Kecamatan Angkona dapat kita lihat pada tabel 6. bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Angkona menganut ajaran Agama Islam dengan jumlah 13.365 jiwa, sementara Ajaran Agama Kristen Katolik penganutnya berjumlah 576 Jiwa, dan jumlah penganut ajaran kristen protestan 1.688 jiwa, selain dari ajaran Agama Kristen Katolik dan Protestan, adapula ajaran Agama Hindu, ajaran Agama ini lebih didominasi penganutnya dibanding ajaran agama kristen, ia menempati posisi kedua setelah Islam, ajaran Agama Hindu dengan Jumlah Penganutnya 6.294 jiwa. Penduduk/masyarakat di Kecamatan Angkona ini secara keseluruhan menganut Ajaran Agama yang berbeda-beda tetapi dengan adanya perbedaan bukanlah sebuah permasalahan, hidup saling menghargai adalah prinsip dari masyarakat Kecamatan Angkona karena perbedaan adalah anugrah terindah

yang diberikan pada Tuhan yang Maha Esa dan substansi dari prinsip masyarakat Angkona selalu berpegang teguh yang berlandaskan pada Pancasila yaitu sila pertama yang menghargai seluruh agama yang dianut Warga Negara Kesatuan Republik Indonesi, Sehingga kerukunan dan kehidupan yang berlangsung di wilayah ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat.pada tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Angkona**

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	15.365
2.	Kristen Katolik	575
3.	Kristen Prosestan	1.688
4.	Hindu	6.294
5.	Budha	-
Jumlah		23.922

*Sumber Data : Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2014.*

## 5. Struktur Organisasi

Dalam mengorganisasikan suatu kegiatan maka diusahakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan ini diperlukan suatu organisasi yang baik pula, baik hubungan kewenangan dan tanggung jawab suatu tugas-tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan memberikan pengertian tentang struktur organisasi sepertiyang dikemukakan oleh The Liang Gie (1974 : 198) sebagai berikut:

"Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan diantara pejabat-pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama

lainnya sehingga jelas kedudukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing suatu kebulatan yang teratur."

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kebanyakan hirarki antara satu dengan yang lainnya, tata hubungan staf dan fungsinya.

Dengan adanya struktur organisasi dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Mengenai pola organisasi pemerintah wilayah kecamatan ialah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1984,.

Di Dalam keputusan itu disebutkan bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan seperti yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat (a) sedangkan dalam Surat Keputusan ini disebut bahwa pemerintah wilayah kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah kecamatan sesuai isi pasal 1 ayat (6).

Adapun perangkat pemerintah wilayah kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Wilayah Kecamatan ;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Unsur aparat Departemen Dalam Negeri.

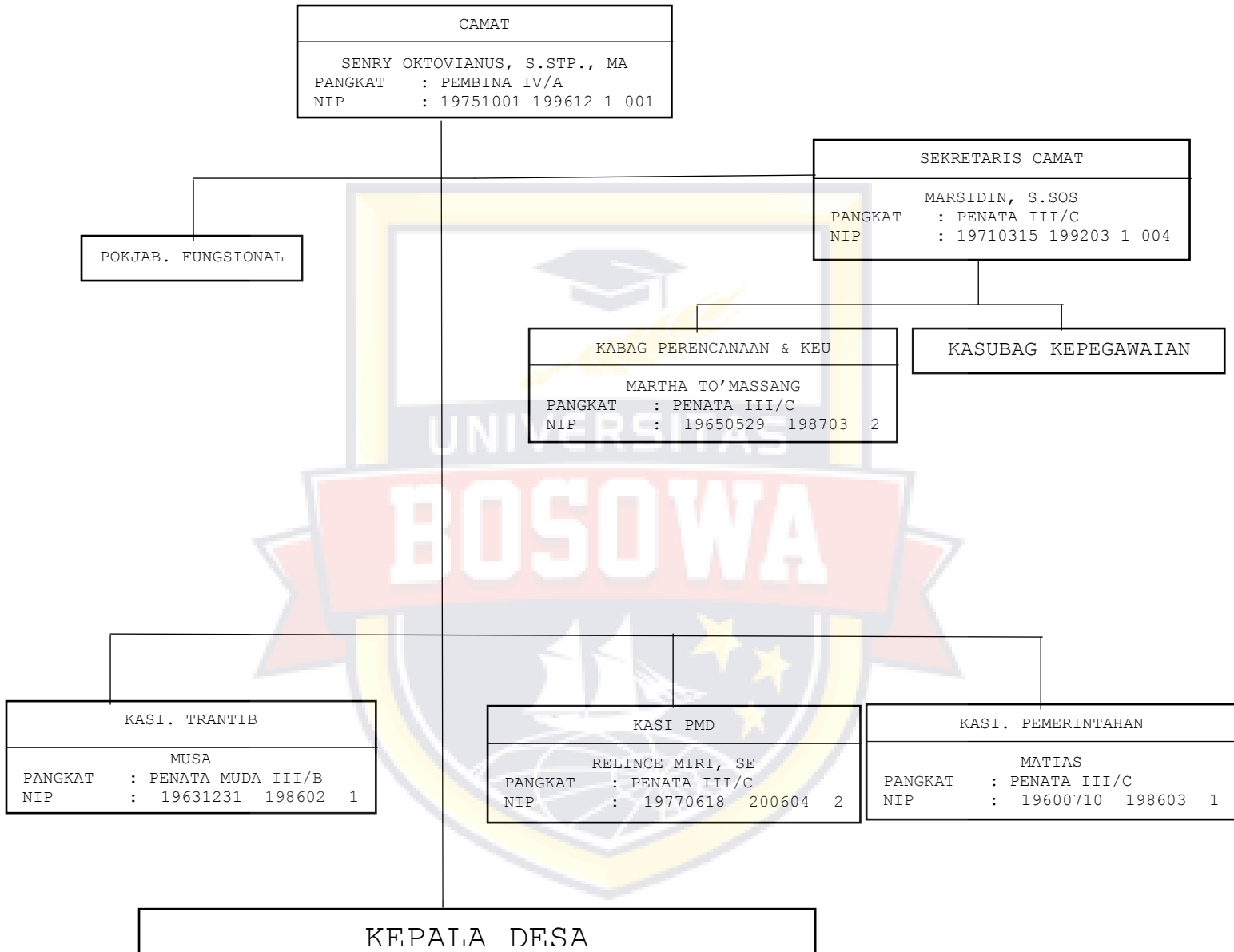
Di samping perangkat-perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang telah disebutkan tidak kalah pentingnya adalah keberadaan unsur aparat

Departemen Dalam Negeri yakni Hansip dan Agraria.

Bila dikaitkan dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Angkona, maka unsur-unsur tadi telah lengkap sehingga pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan secara rutin dan berkesinambungan ke jalan sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat pemerintah kecamatan tidak selamanya berjalan lancar tanpa kendala tapi dengan motivasi kerja dan tanggung jawab yang diberikan maka setiap aparat pelaksana pemerintahan dalam wilayah kerja Kecamatan Angkona tetap berinisiatif dengan berbagai upaya untuk mewujudkan suasana kerja yang efisien dan efektif.

Mengenai struktur organisasi pemerintah Kecamatan Angkona yang sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 dapat dilihat pada halaman terlampir.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEGAWAI KANTOR CAMAT ANGKONA  
PERIODE 2013-2018**



## **6. Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan Angkona**

### **a. Bidang Sosial**

Dalam upaya melaksanakan tugas kepala wilayah kecamatan (camat) Angkona khususnya dalam bidang sosial yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan. Untuk itu agar lebih terperinci mengenai kegiatan tersebut, maka berikut ini penulis akan menguraikan satu persatu, sebagai berikut :

#### **1. Pendidikan**

Salah satu faktor paling utama dalam meningkatkan kualitas manusia adalah melalui pengembangan dan peningkatan sektor pendidikan. Pentingnya bidang pendidikan ini tidak hanya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan manusia guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi juga menjadikan lebih kritis dalam melihat dan menanggapi suatu masalah, yang selanjutnya direalisasikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda-beda tidak menutup suatu kemungkinan adanya pengaruh baik berupa motivasi maupun keikutsertaan di bidang tugas pelayanan wilayah kecamatan.

#### **2. Kesehatan**

Masalah kesehatan di kecamatan Angkona berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat, ini disebabkan karena pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan selalu terbuka pada setiap hari kerja dan sarana kesehatan juga berfungsi dengan baik selain untuk melayani masyarakat di Puskesmas, para aparat kesehatan kecamatan

Angkona senantiasa turun di lapangan untuk mengunjungi masyarakat dan bersama aparat Desa/Kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang kesehatan dan berbagai aspeknya.

#### **b. Bidang Keamanan dan Ketertiban**

Mengenai keamanan dan ketertiban di Kecamatan Angkona boleh dikatakan cukup baik, ini terjadi akibat adanya kerjasama yang harmonis antara Tripika Kecamatan Angkona yaitu antara Kepala Wilayah Kecamatan dengan Koramil dan juga dengan Kapolsek serta ditopang oleh seluruh masyarakat.

Disamping itu ada lagi satuan Hansip pada setiap kelurahan/ desa yang dikoordinir oleh koramil, Hansip Kecamatan Angkona yang disiapkan untuk menanggulangi timbulnya ronrongan dan keresahan masyarakat sedini mungkin untuk dapat dicegah. Melihat fungsi hansip yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tenaga hansip cukup potensial dan mempunyai peranan penting dalam upaya membantu pemerintah Wilayah Kecamatan Angkona di bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Koramil, Hansip kecamatan Angkona dan juga masyarakat, bahwa dengan adanya kerjasama antara camat dengan aparat di bidang keamanan, maka keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat lebih terjamin menuju suatu tata pemerintahan yang stabil. Sehubungan dengan hal itu maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Kepala Wilayah Kecamatan (camat) sebagai stabilisator dalam masyarakat dan membina serta memimpin masyarakat untuk usaha-usaha pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat memelihara jalannya roda pemerintahan dan mengadakan pelayanan kepada masyarakat.

Wilayah Kecamatan Angkona dapat dikatakan stabil, yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tertib, tenang, aman dan tentram yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Walaupun kadang keresahan seperti pencurian, perkelahian dan lain-lainnya walaupun jumlahnya sangat sedikit atau dengan kata lain tidak berarti. Untuk mewujudkan terciptanya suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah yaitu diaktifkannya sistem keamanan lingkungan dengan mendirikan pos keamanan (siskamling) pada tiap ORW/Dusun yang dibina dan dikoordinir oleh Ketua ORW/Dusun dan pengurus LKMD serta seluruh masyarakat.

### **c. Bidang Pembangunan Desa**

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan desa, maka Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijaksanaan umum dalam strategi pembangunan untuk mempercepat pencapaian Desa Swasembada dengan melalui Desa Swasembada dan Desa Swakarsa.

Pembangunan Desa pada dasarnya adalah pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan melalui berbagai lembaga, sedangkan masyarakat memberikan prakarya dan swadaya melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).



Perlu diketahui bahwa dalam kegiatan UDPK, proses perencanaan yaitu menggunakan sistem *Bottom Up Planning* atau perencanaan dari bawah yang dilaksanakan mulai musyawarah LKMD dan kemudian hasil dari musyawarah tersebut diajukan dalam rapat Temu Karya LKMD atau diskusi UDPK kemudian Rekorbang Daerah Luwu Timur.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Angkona dapat berjalan dengan lancar karena petunjuk dan dorongan serta bimbingan Bupati Luwu Timur melalui Bappeda dan Badan Pembangunan Desa Kabupaten Luwu Timur. Hasil pembangunan dalam wilayah Kecamatan Angkona dari tahun ke tahunnya meningkat yang menunjang terwujudnya Desa Swasembada.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Koordinasi Antara Camat Dengan Instansi Vertikal/Otonom Pada Sektor Pembangunan Pendidikan**

Pada dasarnya kegiatan camat angkona dalam melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal tingkat kecamatan adalah berdasarkan pada Panduan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Untuk merealisasikan peraturan tersebut maka kepala wilayah dalam semua tingkat penyelenggara koordinasi yang sebaik-sebaiknya dengan berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Agustus 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas.

Tujuan untuk menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan koordinasi terhadap semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah, adalah:

1. Mendudukan fungsi dan wewenang kepada wilayah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan bagi terwujudnya keserasian dan keberhasilan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan pendidikan.
3. Keseragaman langkah dan terpadunya penyelenggaraan :  
pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dengan demikian, maka kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di wilayah kecamatan angkona khususnya dan kepala wilayah pada semua tingkatan pada umumnya, tidak terlepas dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Instansi/jabatan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di wilayah kecamatan adalah instansi vertikal untuk tingkat kecamatan. Sedangkan yang melakukan atau melaksanakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan hak otonominya di wilayah kecamatan adalah dinas otonom tingkat kecamatan.

Jadi yang dimaksudkan, dengan instansi vertikal adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Sedang pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang telah

menjadi wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan dinas otonom kedua instansi/jawatan ini dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan adalah dibawah koordinasi kepala wilayah kecamatan ke arah tujuan yang hendak dicapai bersama sebagaimana halnya kepala wilayah kecamatan Angkona.

Adapun instansi vertikal tingkat kecamatan wilayah kecamatan Angkona, sebagai berikut:

1. Dinas otonom terdiri dari:
  - a. Puskesmas Angkona
  - b. Mantra Statistik
  - c. Mawil Hansip (Kepala Polisi Pamong Praja)
  - d. Dinas Pertanian
2. Instansi/jawatan vertikal terdiri dari:
  - a. Komando Rayon Militer Angkona
  - b. Kepala Kepolisian Sektor Angkona
  - c. Kepala Kantor Urusan Agama
  - d. Kepala Kantor Depdikbud

Oleh karena banyaknya dinas-dinas daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan yang menjalankan tugas sesuai dengan programnya masing-masing, maka perlu dikoordinasikan kepada suatu tujuan dengan berpedoman pada kesatuan pola aktivitas yang telah digariskan guna mencapai keselarasan. Keserasian dan keterpaduan, baik instansi vertikal dan dinas-dinas daerah agar tercapainya daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pejabat yang berwenang dan berkewajiban melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah agar tercapainya daya guna dan hasilnya yang sebesar-besarnya adalah kepala wilayah kecamatan (camat) Angkona sebagai wakil pemerintah pusat dan juga merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan kecuali di bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum, camat menyelenggarakan koordinasi atas semua kegiatan semua instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan instansi vertikal lainnya. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Menyimak uraian di atas, maka nampak jelas yang berwenang, bertugas dan berkewajiban melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal khususnya yang ada pada tingkat kecamatan adalah kepala wilayah kecamatan (camat), sebagaimana halnya kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona. Namun demikian tidak berarti bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Angkona adalah campur tangan secara teknis administratif dalam penyelenggaraan tugas dari instansi dinas-dinas daerah dan tidak pula membawa perubahan ke arah tanggung jawab instansi atasannya.

Akan tetapi instansi vertikal berkewajiban melaporkan kepada kepala wilayah perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona.

Telah diketahui bahwa kepala wilayah berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Oleh karena itu, kepala wilayah dalam semua tingkat adalah penguasa tunggal yang biasa disebut Administrator pemerintahan, Administrator pembangunan dan Administrator kemasyarakatan. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing instansi vertikal sangat kuat hubungannya antara satu sama lain, dengan demikian maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya, maka perlu penyelenggaraan koordinasi oleh kepala wilayah.

Berkaitan dengan pembangunan dalam bidang pendidikan, maka dalam melaksanakan tugas dari instansi vertikal (Depdikbud) yang berada di bawah koordinasi kepala wilayah, maka instansi vertikal tersebut wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan serta memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh pemerintah pusat dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh kepala wilayah. Dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan instansi vertikal begitu juga antara instansi vertikal dengan dinas daerah, kepala wilayah harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya keserasian dan keberhasilan, Camat Angkona perlu memantapkan koordinasi khususnya tingkat kecamatan dan desa yang baik melalui musyawarah yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

Usaha-usaha pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Angkona selain melalui rapat resmi ada pula usaha-usaha koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Angkona yaitu melalui acara-acara resmi lain yaitu pada upacara hari-hari nasional maupun upacara 17 agustus yang diadakan di tingkat kecamatan, melalui kegiatan ini Camat Angkona memberikan pengertian, petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta informasi tentang masalah atau program yang harus segera dilaksanakan.

Mengenai pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Angkona terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal dan urusan-urusan yang diselenggarakan dinas-dinas daerah atau bawahannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Penilaian Responden Tentang Pelaksanaan Koordinasi yang**  
**Dilaksanakan Oleh Camat Angkona terhadap Instansi Vertikal**  
**(Depdikbud)/Instansi Lain**

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	
		Frekwensi	Presentase
1.	Lancar	30	73,17
2.	Cukup Lancar	6	14,63
3.	Kurang Lancar	-	-
4.	Tidak Lancar	-	-
5.	Tidak Menjawab	5	12,2
Jumlah		41	100

*Sumber Data : Hasil Wawancara Tahun 2014*

Berdasarkan tabel di atas, menyangkut pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Camat Angkona terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah dalam wilayahnya maka Camat Angkona mendapat penilaian lancar 30 responden atau 73,17%, yang memberikan penilaian cukup lancar sebanyak 6 responden atau 14,65%, sedangkan yang memberikan penilaian kurang lancar dan tidak lancar tidak ada yang menilainya. Untuk penilaian pada kategori tidak menjawab sebanyak 5 responden atau 12,2%.

Untuk lebih efektifnya suatu koordinasi, maka harus ditopang oleh kerjasama antara Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah, karena dengan adanya kerja sama dan koordinasi ini tujuan yang telah dicanangkan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya bila melakukan hubungan kerjasama yang efektif.

Mengenai penilaian kerjasama Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona dalam upaya pelaksanaan koordinasi terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Penilaian Responden Tentang Kerjasama Camat Angkona Dengan Instansi Vertikal dan Dinas-dinas Daerah**

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	
		Frekwensi	Presentase
1.	Baik	26	63,4
2.	Cukup baik	7	17,1
3.	Kurang baik	-	-
4.	Tidak baik	-	-
5.	Tidak menjawab	8	19,5
Jumlah		41	100

*Sumber Data : Hasil Wawancara Tahun 2014*

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada di dalam Wilayah Kecamatan Angkona dan memberikan penilaian baik adalah sebanyak 26 responden atau 63,4%, 7 responden atau 17,1% yang memberikan penilaian cukup baik dan tidak menjawab sebanyak 8 responden atau 19,5%.

Dengan adanya hubungan kerjasama, baik antara kepala wilayah kecamatan (camat) dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan program yang telah ditetapkan usaha-usaha yang demikian itu



akan tercermin adanya pengertian yang baik terhadap koordinasi yang dijalankan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Angkona.

Adapun fungsi camat (kepala wilayah) dalam melaksanakan koordinasi terhadap instansi vertikal dan dinas-dinas daerah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi baik fungsional, sektoral maupun regional.
2. Memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan.
3. Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas/kegiatan instansi vertikal.
4. Menyerasikan jadwal pelaksanaan tugas/ kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi.
5. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas instansi vertikal.
6. Meminta keterangan pelaksanaan tugas instansi vertikal.

## **2. Bentuk Koordinasi antara Camat dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan pada Sektor Pembangunan**

Kegiatan pembangunan pendidikan utama dalam usaha pemenuhan/penyediaan tenaga pengajar yang secara umum sering mengalami kekurangan pada tingkat desa/kelurahan yang dikoordinasikan oleh camat adalah menyangkut masalah perencanaan pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan buku-buku pengajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, melaksanakan program pusat dan sudah disesuaikan dengan kondisi daerah, serta melaksanakan penempatan dan pengawasan/pembinaan pendidikan di desa/kelurahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **3. Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Desa/Kelurahan se-Kecamatan Angkona**

Pembangunan pendidikan di desa/kelurahan pada Kecamatan Angkona secara umum dipadukan/dimasukkan dalam kegiatan pembangunan desa secara menyeluruh, hal ini bisa diperhatikan sebagai usaha untuk memobilisasi sumber daya secara terpadu. Untuk itu untuk pelaksanaan pembangunan ini, haruslah dapat dipadukan antara sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah maupun dengan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat sendiri.

Untuk memadukan kedua kategori tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlulah suatu perencanaan yang mantap, dengan memprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tingkat desa/kelurahan adalah ikut sertanya memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan menjadi program kerja. Dengan demikian dalam menyusun program kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan, menggunakan pedoman sesuai dengan instruksi pengendalian pelaksanaan program masuk desa dengan cara sistem *bottom-up*, dimana pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam menentukan rencana pembangunan di daerah dan desa masing-masing.

Agar supaya mekanisme kerja perencanaan dari bawah dapat terkendali, maka pemerintah menganggap perlu untuk menetapkan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan di desa sehingga semua program pembangunan yang masuk ke desa baik yang berasal dari APBN, APBD, maupun dari swadaya masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut, maka perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana/usulan proyek dalam rangka pembangunan di tingkat desa/kelurahan disusun oleh lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD), dengan bimbingan dari camat sebagai pelaku kepala wilayah dengan dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan. Rencana/usulan proyek tersebut disiapkan dan diolah dari bahan-bahan usul perencana yang diajukan LKMD Yang bersangkutan, kemudian diajukan oleh kepala desa/kelurahan kepada Camat.
- b. Semua rencana/usulan proyek dari desa/kelurahan yang telah diterima oleh Camat, kemudian dibahas secara bersama-sama dengan instansi-instansi yang ada di kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) temukarya LKMD pada tingkat kecamatan, dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan bimbingan ketua badan perencana pembangunan daerah (Bappeda) tingkat 1 dan kepala kantor pembangunan desa kabupaten/kotamadya.

Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu

rencana/usulan proyek dari kecamatan yang bersangkutan dalam rangka pembangunan wilayah kecamatan, yang kemudian diajukan oleh camat kepada bupati/walikota kepala daerah yang bersangkutan.

- c. Rencana usulan proyek yang telah diterima dari tingkat kecamatan oleh bupati/walikota kepala daerah tingkat 11, oleh kedua Bappeda Tingkat 11, kepala kantor pembangunan desa kabupaten/kotamadya diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua instansi yang ada di kabupaten/kotamadya bersangkutan dalam Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat 11 (Rakorda Bangdes Tingkat 11). Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada Repelita. Daerah Tingkat 11 dituangkan dalam rencana/usulan proyek dari Kabupaten/Kotamadya untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan.

- d. Rencana/usulan

proyek yang telah diterima dari tingkat kabupaten/kotamadya Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dengan dibantu oleh Ketua Bappeda Tingkat 1 dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua instansi yang di propinsi yang bersangkutan dalam rapat koordinasi Daerah Pembangunan Desa Tingkat 1 (Rakorda Bangdes Tingkat 1).

Hasil pengolahan dan pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada Repelita Daerah Tingkat 1 dituangkan dalam suatu usulan/rencana proyek dari Propinsi Daerah Tingkat 1 untuk kemudian diadakan penyempurnaan

dan penyesuaian dengan pengembangan wilayah dalam forum konsultasi Bappeda, untuk selanjutnya diajukan kepada Bappenas dan Departemen Dalam Negeri C.q. Direktorat Jendral Pembangunan Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusunan pengajuan rencana/usulan program proyek pembangunan desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan Angkona dalam rangka APBN,APBD, maka pada tingkat Desa/Kelurahan di susun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang terbentuk pada tiap Desa/Kelurahan se-kecamatan Angkona yang pada tahap perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Camat Angkona. Untuk lebih mendukung uraian di atas maka dapat dilihat hasil penelitian seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9**  
**Penilaian Responden Tentang Koordinasi Camat dengan Daerah Bawahan dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Desa/Kelurahan**

No.	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Baik	23	56,10
2.	Cukup Baik	6	14,63
3.	Kurang Baik	0	0
4.	Tidak Baik	0	0
5.	Tidak Menjawab	12	29,27
Jumlah		41	100,00

*Sumber Data : Hasil Wawancara Tahun 2014*

Dari data di atas, dapat disampaikan bahwa Koordinasi Camat Angkona dengan daerah bawahan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan pendidikan yang di wilayah Kecamatan Angkona dan memberikan penilaian

baik adalah sebanyak 23 responden atau 56,1%, 6 responden atau 14,63% yang memberikan penilaian cukup baik dan tidak menjawab sebanyak 12 responden atau 29,27%.

#### **4. Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Sekecamatan Angkona**

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program masuk Desa, Maka Kepala Wilayah Kecamatan Angkona melaksanakan pembangunan di Wilayah Kecamatan Angkona dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari proyek yang sumber dananya ada yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah Tingkat II, serta swadaya masyarakat itu sendiri sehingga dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pendidikan, maka Camat Angkona selaku koordinator pelaksana pembangunan pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri dengan melaksanakan pengendalian pembangunan pendidikan dari semua program kerja masuk desa/kelurahan dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat 1
  - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dengan di bantu oleh ketua Bappeda Tingkat 1 dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi mengadakan pengolahan dan penyusunan data anggaran semua program pembangunan yang akan masuk desa, dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:
    1. Keterkaitan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek program dimaksud.
    2. Kemanfaatan proyek dalam jangka waktu singkat terhadap masyarakat secara langsung
    3. Keterpaduan dari berbagai macam program dalam pelaksanaannya terutama bagi program sejenis.
  - b. Hasil pengolahan dan penyusunan data tersebut disajikan dalam Rakorda Bangdes Tingkat 1 bersama-sama Instansi Sektoral dan Dinas Otonom, guna memperoleh pengalaman dan petunjuk koordinasi pelaksanaan di tingkat kabupaten.
2. Di tingkat kabupaten, rincian anggaran program, anggaran tiap sektor untuk tiap kecamatan sesuai dengan hasil pengolahan dan penyusunan data anggaran dari tingkat propinsi, dibahas dalam Rakorda Bangdes Tingkat 11 bersama dengan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.
3. Di tingkat kecamatan, rincian anggaran yang disusun di tingkat kabupaten, oleh camat dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan, dirinci lagi dalam anggaran program untuk setiap desa/kelurahan

dipadukan dengan rencana dan kegiatan pembangunan pendidikan yang berasal dari prakarsa dan suadaya gotong-royong masyarakat, kemudian disajikan dalam temu karya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat kecamatan dan diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) guna meningkatkan koordinasi di tingkat kecamatan dan desa. Hasil rincian tersebut digunakan sebagai bahan pengarah koordinasi pelaksanaan dan sebagai rencana tahunan bagi masing-masing desa.

4. Di tingkat desa/kelurahan, daftar rincian anggaran sektoral masuk desa dibawah kedalam rapat LKMD dengan LMD guna mengambil langkah-langkah pelaksanaannya. Sebagai pelaksana proyek/program tersebut, maka LKMD sesuai dengan fungsinya berperan sebagai penggerak dan pelaksana.

Dari langkah-langkah di atas, maka Kepala Wilayah Kecamatan Angkona melaksanakan rencana/program pembangunan pendidikan desa/kelurahan se-Kecamatan Angkona dengan koordinasi pelaksanaannya ditangani langsung oleh camat berdasarkan daftar usulan proyek. Pelaksanaan koordinasi pembangunan pendidikan di Kecamatan Angkona dapat dilihat pada tanggapan responden seperti digambarkan pada tabel berikut:



**Tabel 10**  
**Penilaian Responden Tentang Koordinasi Camat dalam Perencanaan**  
**Pembangunan Pendidikan di Kecamatan Angkona**

No.	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Lancar	27	65,85
2.	Cukup Lancar	6	14,63
3.	Kurang Lancar	0	0
4.	Tidak Menjawab	8	19,51
Jumlah		41	100,00

*Sumber Data : Hasil Wawancara Tahun 2014*

Berdasarkan data di atas, dapatlah disimpulkan bahwa koordinasi Camat Angkona dengan instansi vertikal, otonom dan daerah bawahan desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona yang memberikan tanggapan/penilaian lancar adalah sebanyak 27 responden atau 65,85%, 6 responden atau 14,63% yang memberikan penilaian cukup lancar dan tidak menjawab sebanyak 8 responden atau 19,51%.

#### **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Wilayah Kecamatan Angkona tentang pelaksanaan upaya keterpaduan yang dilakukan oleh Camat Angkona terhadap instansi vertikal. Dinas-dinas otonom tingkat kecamatan dan pemerintah Desa/LKMD dalam upaya melaksanakan kegiatan pembangunan pendidikan dalah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan bertujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian dalam kenyataannya ada faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan upaya keterpaduan pembangunan pendidikan di Kecamatan Angkona. Fakto-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya keterpaduan terhadap kegiatan pembangunan pendidikan di Kecamatan Angkona menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Upaya Keterpaduan di Kecamatan Angkona Terhadap Kegiatan Pembangunan Pendidikan**

No.	Kategori Penilaian	Tanggapan responden	
		Frekwensi	Presentase
1.	Lancar	15	36,6
2.	Cukup Lancar	8	19,5
3.	Kurang Lancar	12	19,3
4.	Tidak Lancar	-	-
5.	Tidak Menjawab	6	14,6
Jumlah		41	100

*Sumber Data : Hasil Wawancara Tahun 2014*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya keterpaduan kegiatan pembangunan pendidikan adalah faktor kesadaran para kepala instansi vertikal, para kepala instansi/dinas otonom dan kesadaran daerah bawahan (Desa/Kelurahan + LKMD).

Faktor kesadaran kepala instansi vertikal adalah 15 responden atau sekitar 35,6%, faktor kesadaran para Kepala Instansi/Dinas Otonom adalah 8 responden atau 19,5%, faktor kesadaran akan daerah bawahan (Desa + Kelurahan + LKMD) adalah 12 responden atau sekitar 29,3% dan yang tidak menjawab adalah 6 responden atau sekitar 14,6%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi oleh Camat Angkona terhadap kegiatan Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan adalah aktif atau berperan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berada di Wilayah Kecamatan Angkona.
2. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat Angkona terhadap dinas-dinas otonom utamanya dalam kegiatan pembangunan pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona adalah cukup baik. Sedangkan pelaksanaan kerja Camat Angkona dengan Instansi Vertikal dan dinas-dinas otonom adalah baik terutama dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan di bidang pendidikan di Wilayah Kecamatan Angkona.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan adalah:
  - Kesadaran para kepala dinas-dinas otonom untuk mematuhi koordinator.
  - Kesadaran para kepala Instansi Vertikal untuk mematuhi koordinator.
  - Kesadaran daerah binaan (desa/kelurahan + LKMD) untuk mematuhi koordinator.

## B. Saran-Saran

Dengan melihat pembahasan terlebih dahulu, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bimbingan dan pengarahan Camat Angkona terhadap instansi vertikal, instansi/dinas otonom dan daerah bawahan (desa/kelurahan + LKMD) tetap dibina dan ditingkatkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan bisa menghambat koordinasi sedapat mungkin dihindari, antara lainnya:
  - Masih kurangnya kesadaran dari para instansi terkait untuk dapat memahami tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.
  - Kurangnya kesadaran dari berbagai daerah bawahan, utamanya para kepala desa/lurah untuk lebih memahami tugasnya dikaitkan dengan pengajuan program pembangunan desa, terutama mengajukan pembangunan sarana dan prasarana, serta mengajukan penambahan staf pengajar utamanya untuk guru sekolah dasar.
  - Adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh para guru sekolah (guru SD) akibat dari kurangnya staf pengajar yang ada.

### Cara Untuk Menghindarinya

- Perlunya pendekatan yang lebih aktif dan koordinasi yang lebih baik dari camat Angkona dengan para instansi terkait, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Perlu adanya bimbingan dan arahan dari camat kepada pemerintah daerah bawahan untuk lebih aktif mengajukan program pembangunan utamanya pembangunan pendidikan (penyediaan sarana dan prasarana serta staf pengajar).



## DAFTAR PUSTAKA

- Handayaniangkat, Soenarno, 2004, *Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Harbert G. Hicks, G. Ray Gullet, 2000, *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kep. Men. Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004, *Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan*.
- Moersalah, H. Musanat, 2002, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Moh, Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 2002, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT, Sastra Hudaya, Jakarta.
- Ngalim Purwanto, dkk, 2001. *Administrasi Pendidikan*, Mutiara, Jakarta.
- Pamudji. S, 2002, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pamudji. S, 2003, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soegito, Irawan, 2006. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutarto, 2010, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Boyo, 2005, *Organisasi Pemerintahan Wilayah dan Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- S.P Siagian, 2007, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- S.P Siagian, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang, No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- The Liang Gie, 2001. *Administrasi Perkantoran Modern*, PT. Gunung Agung, Jakarta.